

Analisis Penerapan PSAP No. 01 Tahun 2010 terhadap Laporan Pertanggungjawaban Aparat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Bangsalsari Jember

Shovi Hasanah, Diana Dwi Astuti^b, Lia Rachmawati^c

^aInstitut Teknologi dan Sains Mandala, sshofi732@gmail.com

^bInstitut Teknologi dan Sains Mandala, diana@stie-mandala.ac.id

^cInstitut Teknologi dan Sains Mandala, liarachmawati@stie-mandala.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

05 Januari 2023

12 Februari 2023

11 April 2023

Keywords:

Implementation of Government Accounting Standards, Accountability, Village Finance

Kata Kunci:

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pertanggungjawaban, Keuangan Desa

ABSTRACT

This study aims to find out whether villages in Bangsalsari District have implemented Government Accounting Standard Statement No. 01 on the accountability reports of village officials in managing village fund finances and to find out how the procedures made by villages in Bangsalsari sub-district in presenting village financial accountability reports. The type of research used in this research is qualitative research. The data used in this study are primary and secondary data. Data collection techniques were carried out using interview techniques and documentation studies. This research was conducted at the Bangsalsari District Village Office. The results of this study indicate that the application of Government Accounting Standards in Village Financial Accountability in this village has not been fully said to be good because there are still some financial reports that are not made by the village government and the procedure for making village financial accountability reports is in accordance with which by making an Implementation Realization Accountability Report. APBDes, Village Regulations, Village Property Reports and Reports of Government and Regional Government Programs that enter the village.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah desa di Kecamatan Bangsalsari sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 01 terhadap laporan pertanggungjawaban aparat desa dalam pengelolaan keuangan dana desa serta untuk mengetahui bagaimana prosedur yang dibuat desa di kecamatan bangsalsari dalam meyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Kecamatan Bangsalsari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa di desa ini belum sepenuhnya dikatakan baik karena masih ada beberapa laporan keuangan yang tidak dibuat oleh pihak pemerintah desa dan untuk prosedur pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa sudah sesuai dimana dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, Peraturan Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

PENDAHULUAN

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat maupun daerah. Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahana dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang

tepat selama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasann, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Hardiyani & Indarja 2016).

Pengelolaan keuangan desa tersebut dibuatlah Standar Akuntansi yang menjadi acuan dan pedoman bagi para akuntansi yang berada dalam organisasi sektor publik. Sebagaimana tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan mengalami perubahan dengan terbitnya peraturan baru pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupu pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas. SAP berbasis akrual diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemeritah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah. (Fauziah ifat, 2018: 10)

Peraturan Pemerintah menyatakan bahwa SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. (Mursyidi, 2009:32). Diterbitkannya PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang akan digunakan pemerintah untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang harus sesuai dengan SAP telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2010 menyatakan bahwa SAP dijelaskan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yang dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi pemerintahan dan disusun berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa

desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberlakuan Undang-Undang Desa menetapkan entitas desa sebagai entitas pelaporan. Entitas desa memiliki kewenangan yang lebih besar dalam hal belanja termasuk kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Desa. Konsekuensi kewenangan membentuk Badan Usaha Desa mencerminkan adanya wewenang untuk melakukan pengeluaran pembiayaan seperti entitas pelaporan. Entitas laporan pertanggungjawaban atas anggaran yang telah digunakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No.01 Tahun 2010 yaitu terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas, Dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Jember adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukota Kabupaten Jember adalah Kota Jember yang terletak di tengah-tengah wilayah Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 226 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan. Diantaranya kecamatan Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jember, Kecamatan Bangsalsari mempunyai 11 desa yang meliputi desa Curah Kalong, Gambirono, Bangsalsari, Tugusari, Sukorejo, Langkap, Petung, Badean, Trisnogambar, Karangsono dan Banjarsari. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahannya diharuskan untuk menyusun laporan keuangan pemerintahan sebagai informasi dan pertanggungjawaban Penyusunan laporan keuangan. Namun penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.01 pada desa di kecamatan Bangsalsari belum sepenuhnya di laksanakan atau diterapkan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan belum diselenggarakan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 1) Prosedur Pemerintahan Desa di Kecamatan Bangsalsari dalam menyajikan laporan

pertanggungjawaban keuangan desa, 2) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 dalam pertanggungjawaban keuangan desa di Kecamatan Bangsalsari.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian akuntansi menurut *American Accounting Association (AAA)* (1996) akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (*keuangan*) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut *Financial Accounting Standard Board (FASB)* tahun 1973 akuntansi adalah pengetahuan badan dan fungsinya terkait dengan sistematika pencatatan, pengklasifikasian, pengelolaan, peringkasan, penganalisisan, dan kejadian-kejadian yang terkait, setidaknya untuk sebagian dari karakter keuangan, yang diperlukan oleh manajemen dan oprasionalisasi suatu entitas dan untuk pelaporan yang harus disampaikan guna memenuhi *fiduciary* dan tanggung jawab lainnya.

Menurut Sudaryo Akuntansi pemerintahan di artikan sebagai aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah kepada para pengguna berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas keuangan tersebut. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (yang selanjutnya di singkat SAP) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang di terapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Dengan berlakunya SAP, laporan dari pemerintah pusat dan daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan dari pemerintah akan lebih mudah dipahami dan dapat diukur tingkat kualitasnya berdasarkan standar- standar akuntansi pemerintahan tersebut.

Menurut Munawir dalam Fahmi (2013) mengatakan “laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang

bersangkutan.” Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna untuk membuat keputusan ekonomi bersifat finansial.

Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan menteri dalam negeri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. (Sujarweni, 2015:17)

METODA PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana laporan pertanggungjawaban keuangan Desa di Kecamatan Bangsalsari Jember.

Penelitian ini menggunakan purposive pengambilan sampel untuk mengumpulkan data atau informasi yang dapat menjelaskan permasalahan suatu penelitian karena sampel yang diambil mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana interaksi sosial yang terjadi antar sesama aparat desa di Kecamatan Bangsalsari.

Metode Pengambilan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas yang sistematis terhadap gejala-gejala baik bersifat fiskal maupun mental. Partisipasi pengamat (peneliti) dalam melakukan observasi dapat dilakukan dalam berbagai kondisi, seperti yang dikemukakan oleh Nasution (1992:61), bahwa “terdapat tingkatan dalam melakukan observasi, yaitu partisipasi nihil, partisipasi aktif dan partisipasi penuh” dalam penelitian.

2. wawancara

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama peneliti melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada responden yang berkompeten di kantor kepala desa Curah Kalong pada bidang keuangan.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi suatu metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen laporan realisasi anggaran dan

pengumpulan data yang di peroleh dimana penulis turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dan fakta yang berkenaan dengan topik yang di teliti dan kemudian dilakukan pengkajian serta penelaanan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diamati.

Teknis analisis data tersebut dilakukan di lapangan atau bahkan bersamaan dengan proses pengumpulan data dan sesudahnya. Ada dua hal yang penting dalam analisis tersebut; Pertama, analisis data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan yang biasanya “diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis, tetapi analisis ini tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperlukan. Kedua, analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu; (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 (dua) bulan setengah, dengan jumlah informan sebanyak 3 (tiga) orang per desa yaitu meliputi desa curah kalong, bangsalsari dan gambirono. Adapun karakteristik informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Karakteristik Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Abdul Kadir	Laki-Laki	Kepala Desa Curah Kalong
2	Bukori Ismail	Laki-Laki	Sekretaris Curah Kalong
3	Eko Rudiansya	Laki-Laki	Kaur Keuangan Curah Kalong
4	Budiyono	Laki-Laki	Kepala Desa Gambirono
5	Ahmad Fauzi	Laki-Laki	Sekretaris Gambirono
6	Hiro Hermawan	Laki-Laki	Kaur Keuangan Gambirono
7	H. Nurholis	Laki-Laki	Kepala Desa Bangsalsari
8	Burhanuddin	Laki-Laki	Sekretaris Bangsalsari
9	Yanuar Wahyu P	Laki-Laki	Kaur Keuangan Bangsalsari

Pelaksanaan wawancara di lakukan melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris dan Keuangan, wawancara ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian yang telah di rumuskan. Hasil penelitian ini merupakan

deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Prosedur Pemerintahan Desa dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa

Dalam prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban, setiap pemerintah desa harus memiliki formulir dan dilengkapi untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban. Adapun data atau formulir yang digunakan adalah:

- a. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaa APBDesa
- b. Peraturan Desa
- c. Laporan Kekayaan Milik Desa
- d. Buku Kas Umum
- e. Buku Pembantu Kas

Dalam prosedur pertanggungjawaban keuangan desa, ada beberapa pihak pelaksana unit kerja yang terlibat antara lain:

- a. Sekretaris desa
- b. Kepala desa
- c. Bupati/Walikota
- d. Camat atau sebutan lain
- e. Kaur
- f. Masyarakat

Dalam proses prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa, adapun berikut tahap kegiatan yang di lakukan dalam prosedur pertanggungjawaban keuangan desa adalah:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
- b. Laporan pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan Desa.
- d. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawabn realisasi pelasaan PBDesa dilampiri:

- 1) Format Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran yang berkenan.
 - 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran yang berkenan.
 - 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- e. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - f. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informs lainnya.
 - g. Laporan Realisasi dann Laporan Pertanggungjawabban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain.
 - h. Laporan Pertanggungjawabn Realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Desa gambirono, bangsalsari dan curah kalong Kecamatan Bangsalsari belum terlaksanakan sepenuhnya karena penyajian Laporan Keuangan yang dibuat oleh Desa tersebut hanya sebatas Laporan Realisasi Anggaran Penggunaan Dana Desa. Hal ini juga tidak sesuai dengan amanat PP No. 71 tahun 2010, mengenai penyajian laporan keuangan bagi pemerintah yang telah menggunakan dana publik, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Jenis Laporan Keuangan

No	Jenis Laporan Keuangan	Ada	Tidak Ada
1	Laporan Realisasi Anggaran	✓	
2	Laporan Perubahan Awal Saldo Anggran Lebih	-	✓
3	Neraca	-	✓

4	Laporan Operasional	-	✓
5	Laporan Arus Kas	-	✓
6	Laporan Perubahan Ekuitas	-	✓
7	Catatan atas Laporan Keuangan	-	✓

Sumber:Desa Curah Kalong, Gambirono dan Bangsalsari

Untuk Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa ini masih belum sepenuhnya diterapkan atau melaksanakannya karena untuk penyajian laporan keuangannya desa kami hanya membuat Laporan Realisasi penggunaan dana desa saja yang dibuat oleh bendahara desa dan untuk basis akuntansi yang kita pakai sudah memakai basis akuntansi yang akrual sesuai dengan PSAP 01. Jika untuk Penyajian Laporan Keuangan di Desa Gambirono ini sudah menerapkan PSAP 01 namun belum sepenuhnya menerapkan, disini hanya menggunakan atau menerapkan Laporan Realisasi Anggaran saja.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Dengan berlakunya SAP, laporan dari pemerintah pusat dan daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan dari pemerintah akan lebih mudah dipahami dan dapat diukur tingkat kualitasnya berdasarkan standar- standar akuntansi pemerintahan tersebut.

Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (on the face) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pospos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format ilustrasi standar ini yang dapat diikuti oleh suatu entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing. Pernyataan standar ini menggunakan istilah pengungkapan dalam arti yang seluas-luasnya, meliputi pos-pos yang disajikan dalam setiap lembar muka Laporan Keuangan. Pengungkapan yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya disajikan sesuai dengan ketentuan dalam standar tersebut. Kecuali ada standar yang mengatur sebaliknya, pengungkapan yang

demikian dibuat pada lembar muka laporan keuangan yang relevan atau dalam catatan atas Laporan Keuangan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Pertanggungjawaban keuangan Desa di Kecamatan Bangsalsari dapat dikatakan belum cukup baik berdasarkan penjelasan di dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No.01 dalam pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaporan pertanggungjawaban keuangannya belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No.01 karena Laporan Keuangan untuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh Desa Kecamatan Bangsalsari hanya dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang akan disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi setiap semester pertahunnya. Selanjutnya Kecamatan yang akan menyempurnakannya menjadi Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu fokus pada Dana Desa dan Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Bangsalsari yang berjumlah 11 desa akan tetapi peneliti membatasi 3 desa yaitu desa curah kalong, desa gambirono dan desa Bangsalsari tahun periode 2021.

Saran yang dapat diberikan peneliti yaitu diharapkan dalam tahap penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah Desa Kecamatan Bangsalsari harus sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No.01 dalam pertanggungjawaban Keuangan desa yang sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 dimana dengan melengkapi komponen laporan keuangan berdasarkan undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyono, Andri. (2010)*Arti Penting Laporan Keuangan*. Jurnal ilmu manajemen
- Burhan Bungin (2012).*Analisi Data Penelitian Kualitatif*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahmi. (2013) *Analisis Laporan Keuangan*,Bandung: Alfabeta.
- Fauziah Ifat (2018) *SAP Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Penerbit Ilmu
- Hardiyani T.H& Indarj H.J(2016). Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Desa Gumantar Kecamatan Karagmalang Kabupaten Sragen)*Diponogoro Law Journal*,5(3),1-14

- Lubis, S. M. Y. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal) (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*).
- Mursyidi 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung:PT Refika Aditama
- Paidi P (2019). Analisis Penerapan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan) (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*)
- Sujaweni.2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press